KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : bola panas pembangunan kompleks dpr?
Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : a2

Bola Panas Pembangunan Kompleks DPR?



Bola panas rencana pembangunan tujuh proyek di kompleks parlemen terus bergulir. Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mau menandatangani prasasti rencana pembangunan gedung DPR yang baru itu saat berpidato di hadapan anggota DPR pada Jumat (14/8) lalu, DPR tampaknya tak kehabisan akal.

Bahkan, untuk merealisasikan rencana proyek itu, DPR meminta pembangunan kompleks parlemen diambil alih pemerintah. Seolah, pembangunan tujuh proyek prestisius itu merupakan sesuatu yang mendesak.

"Sikap Presiden Jokowi yang tak mau menandatangani prasasti pembangunan kompleks DPR itu sudah tepat. Jokowi tak mau dilibatkan dengan proyek itu. Sejak awal rakyat juga menolak rencana pembangunannya. DPR ingin melempar bola panas proyek pembangunan gedung DPR itu ke Presiden Jokowi. Mereka berharap, jika Presiden menyetujuinya, rakyat tidak akan memprotes. Bola panas dilempar ke Jokowi," ujar sumber *SP* di Jakarta, Rabu (19/8).

Rencana pembangunan gedung DPR, kata sumber itu, sudah sejak tahun lalu didengungkan. Bahkan, desain kompleks DPR juga telah disiapkan jauh-jauh hari. Seolah mendesaknya pembangunan gedung tersebut membuat sejumlah anggota DPR gerah. Bahkan, sejumlah anggota DPR merasa malu rencana penandatanganan prasasti diungkapkan pimpinan DPR pada pidato kenegaraan. "Ada apa di belakang itu semua. Kenapa pimpinan harus ngotot?" ucapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah mengambil alih pembangunan proyek itu. Hal itu sangat penting agar DPR tidak lagi disorot atas rencana pembangunannya. "Semua pihak bisa mengawasi proyek itu. Yang jelas, anggota DPR tak akan terlibat dalam proyek ini," ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

DPR, kata Fadli, hanya sebagai pengusul dibangunnya kompleks parlemen. Diusulkannya pembangunan itu karena DPR sangat membutuhkan gedung baru. Untuk tahap awal, di kompleks DPR akan dibangun alun-alun demokrasi. Selanjutnya akan disusul pembangunan lainnya di waktu berikutnya.

Saat ini, kata Fadli, proyek tersebut ditangani oleh Sekretariat Jenderal DPR. Saat ini Sekretariat Jenderal DPR telah membuat sayembara desain arsitektur kompleks parlemen yang total hadiahnya mencapai Rp 500 juta. [H-14]